



UNIVERSITAS WIRARAJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : lppm@wiraraja.ac.id Website : lppm.wiraraja.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 292/SP.HCP/LPPM/UNIJA/X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Anik Anekawati, M.Si
Jabatan : Kepala LPPM
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

1. Nama : Nur Inna Alfiah, S.IP., M.Hub.Int.
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Telah melakukan cek plagiarisme ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul "**KEBIJAKAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AFGHANISTAN PASCA BERKUASANYA TALIBAN**" dan mendapatkan hasil similarity sebesar 25%

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 06 Oktober 2022

Kepala LPPM,



Dr. Anik Anekawati, M.Si.
NIDN. 0714077402

KEBIJAKAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA- AFGHANISTAN PASCA BERKUASANYA TALIBAN

by Nur Inna Alfiyah

Submission date: 06-Oct-2022 11:02AM (UTC+0700)

Submission ID: 1917954814

File name: 0727039101-4313-Artikel-Plagiasi-05-10-2022.docx (37.14K)

Word count: 3571

Character count: 25390

KEBIJAKAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AFGHANISTAN PASCA BERKUASANYA TALIBAN

Oleh: Nur Inna Alfiyah.,S.IP.,M.Hub.Int

Email: nurinna@wiraraja.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hubungan bilateral Indonesia-Afghanistan pasca beralihnya kepemimpinan demokratik Afghanistan ke tangan Taliban pada Agustus 2021. Karena selama ini hubungan bilateral yang terjadi antara Indonesia dan pemerintahan demokratik Afghanistan sudah berjalan dan terimplimentasi dengan baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian dengan memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif dengan menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral dengan Afghanistan akan tetap berlanjut meskipun pemerintahan telah beralih ke tangan Taliban. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk selalu berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses perdamaian di Afghanistan.

Kata kunci: Kebijakan, Hubungan Bilateral, Indonesia-Afghanistan

Abstract

This study aims to determine the various policies of Indonesia-Afghanistan bilateral relations after the transfer of democratic leadership in Afghanistan to the hands of the Taliban in August 2021. Because so far the bilateral relations between Indonesia and the democratic government of Afghanistan have been running and are well implemented. The method used in this study is a qualitative descriptive method which is a research method by utilizing qualitative and descriptive data by analyzing social events, phenomena, or circumstances. The results of this study indicate that the commitment of the Indonesian government in establishing bilateral relations with Afghanistan will continue even though the government has shifted to the hands of the Taliban. The Indonesian government is also committed to always participating and playing an active role in the peace process in Afghanistan.

Keywords: Policy, Bilateral Relations, Indonesia-Afghanistan

PENDAHULUAN

Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Berbagai forum, baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Dalam menjalin hubungan tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu

teritori khusus yang berupa non-self governing territory. Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam delapan kawasan (Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, dan Eropa Tengah dan Timur) (Kemenlu, 2020).

Dalam menjalankan Hubungan Internasional, Indonesia memiliki 3 Landasan Hubungan Internasional yang selalu dijadikan acuan, diantaranya adalah: 1) Landasan Idiil : Pancasila (Sila II), 2) Landasan Konstitusional : UUD 1945 (Pembukaan alinea I dan IV) dan 3) Landasan Operasional : GBHN (Nanda, 2020). Landasan idiil merupakan suatu landasan yang menjadi ideologi suatu bangsa, dalam hal ini landasan Idiil Indonesia adalah Pancasila. Landasan Idiil hubungan internasional Indonesia adalah Pancasila sila kedua, yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menganggap dirinya sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Landasan konstitusional merupakan landasan yang berkaitan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan / undang-undang dasar suatu negara. Landasan Konstitusional hubungan internasional Indonesia adalah UUD 1945 terutama dalam pembukaan (alinea I dan IV). Landasan Operasional merupakan suatu konsep dasar tujuan pengelolaan secara menyeluruh dari kehidupan nasional suatu Negara. Terdapat 4 elemen landasan operasional hubungan internasional Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR, yaitu GBHN dalam bidang hubungan luar negeri. Menurut GBHN (TAP MPR RI No. IV/MPR/1999) misi hubungan luar negeri Indonesia adalah perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan pro aktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.
2. Undang-Undang, misalnya UU. No. 37 /1999 tentang hubungan luar negeri
3. Keputusan / Kebijakan presiden, yang dituangkan dalam Perpres.
4. Kebijakan / peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri luar negeri.

Tujuan yang nantinya akan dicapai dari hubungan internasional adalah mewujudkan ketertiban serta perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam hubungan internasional menggunakan politik luar negeri bebas aktif. Ada dua pengertian dari politik luar negeri bebas aktif yaitu bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia memiliki kebebasan dalam menentukan pandangannya terhadap berbagai permasalahan internasional. Sedangkan aktif adalah Indonesia secara aktif memperjuangkan perdamaian dunia, memperjuangkan kebebasan, kemerdekaan dan keadilan di seluruh dunia (Mustinda, 2020). Atas dasar inilah kemudian hubungan bilateral Indonesia

terlaksana, salah satunya dengan Afghanistan. ⁵ Afghanistan adalah salah satu negara yang paling awal mengakui Republik Indonesia setelah revolusi berakhir pada tahun 1949. Afghanistan dan Indonesia secara resmi membuka hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1954, pada tahun yang sama Afghanistan membangun kedutaan besarnya di Jakarta. Perjanjian persahabatan pertama antara Afghanistan dan Indonesia ditanda-tangani pada 24 April 1955. Perjanjian tersebut akhirnya baru terealisasi pada 10 November 2012, pasca diambil alihnya Afghanistan dari penguasaan Taliban. Perjanjian bilateral Indonesia-Afghanistan ⁵ ditanda-tangani kedua negara untuk mempromosikan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi dan perdagangan, akademik dan edukasi, serta kebudayaan.

Akan tetapi hubungan bilateral Indonesia-Afghanistan tersebut menjadi tanda tanya ketika pada Agustus 2021, Taliban berhasil menguasai Afghanistan dengan kejatuhan ibu kota Kabul dan istana kepresidenan Afghanistan. Hal ini juga ditandai dengan mundurnya tentara Afghanistan di sejumlah daerah tanpa perlawanan ketika Taliban menyerang. Sebagian pejabat pemerintah Afghanistan, termasuk Presiden Ashraf Ghani, juga kabur ke luar negeri tak lama usai Taliban menduduki Ibu Kota Kabul. Sedangkan militer AS pun terlihat tak lagi agresif membantu pasukan Afghanistan sejak sebagian personelnya meninggalkan negara itu (Suastha, 2021). Kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan menjadikan peningkatan hubungan bilateral yang ada menjadi tanda tanya bagi pemerintah Indonesia. Sehingga dibutuhkan alternatif kebijakan lain oleh Indonesia terkait bagaimana menyikapi perubahan situasi politik yang terjadi di Afghanistan. Sehingga dalam penelitian ini akan melihat bagaimana langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memelihara hubungan bilateral dengan Afghanistan pasca Taliban berkuasa.

PEMBAHASAN

² Perang Afghanistan telah berlangsung selama ±19 tahun, diawali oleh serangan Amerika Serikat kepada Al-Qaeda dan Taliban lalu kemudian menjadi perang antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. Kejadian serangan teroris 9/11 yang dipimpin oleh Al-Qaeda telah menjadi pemicu awal perang Afghanistan. Deklarasi *War of Terror* oleh Presiden AS George W. Bush telah menjadikan terorisme sebagai musuh dunia yang harus dilawan bersama-sama dan dalam melawan teroris, AS mengintervensi dan menyerang Afghanistan atau disebut sebagai *Operation Enduring Freedom* (OEF) ke Afghanistan. Bush dengan segera meminta pemerintah Taliban untuk menyerahkan pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden yang bersembunyi di Afghanistan, tetapi al-Qaeda justru didukung oleh rezim Taliban

sehingga AS dengan sigap menyerang Afghanistan. Afghanistan dipandang sebagai musuh Amerika Serikat karena serangan teror 9/11 dilakukan oleh Al-Qaeda dengan dukungan rezim Taliban, serangan demi serangan dan pasukan keamanan pun yang dikerahkan AS ke Afghanistan selama bertahun-tahun (Rachman & Dkk, 2021). Selama intervensi dan serangan AS di Afghanistan berlangsung, Taliban telah jatuh pada 2001 dan pemerintahan Afghanistan yang terpilih telah menggantikan Taliban. Perubahan dari rezim Taliban ke pemerintah Afghanistan telah menjadi sebuah transisi ke pemerintahan yang demokratis (Thomas, 2020). Perubahan sistem pemerintahan ke demokratis telah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan perekonomian Afghanistan. Transisi ke pemerintahan demokratis dimulai melalui perjanjian Bonn tahun 2001, yang berusaha untuk menyatukan pendekatan pemerintahan yang berdasarkan legitimasi legal-rasional lembaga negara modern melalui penyusunan konstitusi baru dan penyelenggaraan pemilu yang bebas (Dalton, 2008). Setelah jatuhnya rezim Taliban di Afghanistan, Taliban secara cepat berpindah ke selatan Afghanistan dan melintasi perbatasan ke Pakistan. Dari sana, mereka melancarkan pemberontakan melawan pemerintah yang didukung barat dan Afghan National Defense and Security Forces (ANDSF) (Rachman & Dkk, 2021).

Pasca transisi pemerintahan ke demokratis inilah kemudian negara-negara lain seperti Indonesia mulai mempererat kembali hubungan bilateralnya dengan pemerintahan Afghanistan yang baru. Hubungan bilateral tersebut semakin dipererat pada masa pemerintahan Jokowi, dimana peningkatan hubungan bilateral dengan Pemerintah Afghanistan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan perdamaian. Disamping itu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebutkan, salah satu aspek dalam peningkatan kerja sama bilateral tersebut karena intensitas hubungan antara sektor swasta Indonesia dan Afghanistan mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan hubungan kedua negara ini dapat terlihat dari bidang ekonomi, yaitu adanya lonjakan partisipasi pengusaha asal Afghanistan dalam Trade Expo di Indonesia. Hal yang penting dalam elemen kerja sama ekonomi, pemerintah berupaya menjembatani dan memfasilitasi BUMN Indonesia dalam proyek-proyek ekonomi di dalam Afghanistan (Republika, 2017).

Di bidang sosial budaya, pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam upaya penyadaran terhadap pentingnya peran perempuan. Ini didasari dari pada saat Taliban berkuasa, hak-hak perempuan dirampas, wanita tidak dapat menjalankan hak mereka terutama dalam hal pendidikan, pekerjaan hingga kebebasan bergerak. Concern terhadap masalah sosial budaya terutama restriksi terhadap wanita pada masa pemerintahan Taliban setidaknya ada empat

masalah utama yang dihadapi kaum perempuan pada masa pemerintahan Taliban menurut U.S. Department of State, diantaranya (US. Department Of State, 2001); Pertama, sebelum munculnya Taliban, perempuan di Afghanistan dilindungi dibawah hukum dan diberikan hak-hak dalam masyarakat Afghanistan. Perempuan menerima hak untuk memilih pada tahun 1920-an; dan pada awal tahun 1960-an, konstitusi Afghanistan mengatur kesetaraan bagi perempuan. Ada suasana toleransi dan keterbukaan ketika negara itu mulai bergerak menuju demokrasi, perempuan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional. Pada tahun 1977, perempuan terdiri lebih dari 15% dari badan legislatif tertinggi Afghanistan. Diperkirakan pada awal 1990-an, 70% guru sekolah, 50% pegawai pemerintah dan mahasiswa, dan 40% dokter di Kabul adalah perempuan. Wanita Afghanistan telah aktif dalam organisasi bantuan kemanusiaan sampai Taliban memberlakukan pembatasan ketat pada kemampuan dan ruang gerak mereka dalam bekerja.

Kedua, disamping pembatasan dalam hal pekerjaan, dibidang pendidikan dan perawatan kesehatan untuk kaum perempuan juga dihilangkan pada masa pemerintahan Taliban. Sejak Tahun 1998, Taliban mengakhiri pendidikan untuk anak perempuan dimana anak di atas usia delapan tahun dilarang bersekolah. Di bawah pemerintahan Taliban, perempuan juga hanya diberi akses paling dasar ke perawatan kesehatan dan perawatan medis, sehingga membahayakan kesehatan perempuan. Di sebagian besar rumah sakit, dokter pria hanya bisa memeriksa pasien wanita jika dia berpakaian lengkap, mengesampingkan kemungkinan diagnosis dan pengobatan yang berarti. Peraturan Taliban ini menyebabkan kurangnya perawatan medis yang memadai bagi perempuan dan berkontribusi pada peningkatan penderitaan dan tingkat kematian yang lebih tinggi. Afghanistan memiliki tingkat kematian ibu saat melahirkan terburuk kedua di dunia. Sekitar 16 dari setiap 100 wanita meninggal saat melahirkan.

Ketiga, dibelenggu oleh Pembatasan Pergerakan (*Fettered by Restrictions on Movement*). Di daerah perkotaan, Taliban secara brutal memberlakukan aturan berpakaian yang mengharuskan wanita untuk mengenakan burqa (pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh dari kepala hingga kaki). Burqa tidak hanya menjadi beban fisik dan psikologis bagi beberapa wanita Afghanistan, tetapi juga merupakan beban ekonomi yang signifikan. Banyak wanita tidak mampu membeli atau membuat satu burqa karena kendala ekonomi yang dihadapi. Dalam beberapa kasus, beberapa keluarga terkadang harus berbagi satu pakaian, dan wanita harus menunggu berhari-hari untuk giliran mereka keluar. Bahkan ketika berpakaian menurut aturan Taliban, gerakan wanita sangat dibatasi. Perempuan diizinkan keluar hanya jika

ditemani oleh kerabat laki-laki atau berisiko dipukuli atau mendapatkan sanksi oleh Taliban. Wanita tidak dapat menggunakan taksi umum tanpa ditemani kerabat pria, dan pengemudi taksi berisiko kehilangan SIM atau pemukulan jika mereka membawa penumpang wanita tanpa pengawalan. Wanita hanya bisa menggunakan bus khusus yang disediakan untuk mereka, dan bus-bus ini memiliki jendela yang ditutup dengan tirai tebal sehingga tidak ada seorang pun di jalan yang bisa melihat penumpang wanita.

Keempat, Pelanggaran Hak Dasar (*Violation of Basic Rights*). Taliban mengklaim selalu berusaha untuk memastikan masyarakat di mana perempuan memiliki peran yang aman dan bermartabat. Namun fakta menunjukkan sebaliknya. Wanita dilucuti martabatnya di bawah Taliban. Mereka dibuat tidak mampu menghidupi keluarga mereka. Anak-anak perempuan tidak mendapatkan perawatan kesehatan dasar dan tidak bisa bersekolah. Mereka bahkan kehilangan masa kecil mereka di bawah rezim dengan melarang masuknya kemajuan teknologi hingga pemutaran lagu bahkan lagu Afghanistan sendiri. Kebijakan diskriminatif Taliban melanggar banyak prinsip dasar hukum hak asasi manusia internasional. Hak-hak ini termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, hak untuk bekerja, hak atas pendidikan, kebebasan bergerak, dan hak atas perawatan kesehatan. Terlebih lagi, seperti yang telah dicatat oleh *Human Rights Watch*, “diskriminasi (yang dihadapi perempuan Afghanistan) bersifat kumulatif dan begitu besar sehingga secara harfiah mengancam kehidupan banyak perempuan Afghanistan.” Serangan terhadap peran perempuan ini tidak didikte oleh sejarah dan adat istiadat sosial Afghanistan seperti yang diklaim Taliban. Pembatasan Taliban terhadap perempuan juga tidak sejalan dengan kenyataan di negara-negara Muslim lainnya. Seperti di Indonesia perempuan bahkan bisa menjabat sebagai Presiden dan Perdana Menteri di Bangladesh. Perempuan memiliki hak untuk memilih di negara-negara Muslim seperti Qatar, Iran, dan Bahrain. Di seluruh dunia Muslim, wanita mengisi posisi yang tak terhitung jumlahnya sebagai dokter, guru, jurnalis, hakim, pebisnis, diplomat, dan profesional lainnya. Secara keseluruhan, perempuan di Afghanistan pada dasarnya tidak diperlakukan sebagai manusia. Untuk mengatasi hal ini, perlu dikembangkan program-program khusus yang berorientasi gender yang akan mencakup, terutama dan pertama-tama, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan yang layak bagi perempuan.

Atas dasar inilah kemudian pemerintah Indonesia menyuarakan dukungannya terhadap penanganan masalah perempuan Afghanistan dan pemerintah Indonesia juga kerap meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui Kemen PPPA. ⁶ **Kerjasama antara Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kementerian PPPA)**

dan Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan telah terjalin sejak 18 Desember 2013 dengan penandatanganan MoU tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan Indonesia dan Afghanistan di bidang ekonomi, kesehatan, Pendidikan serta peran perempuan dalam isu Kesehatan gender. MoU tersebut menjadi dasar pijakan KBRI di Kabul, Afghanistan untuk menjabarkan beberapa kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua Negara. Pemerintah Indonesia, Kementerian PPPA dan KBRI Kabul telah melakukan kerjasama untuk pemberdayaan wanita di Afghanistan, upaya kerjasama yang telah dilakukan adalah kunjungan menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia ke Afghanistan, Kunjungan Ibu negara Afghanistan ke Indonesia, undangan untuk business woman Afghanistan mengikuti trade expo, trade workshop dan seminar-seminar di Indonesia dan beasiswa dan *short course* untuk mahasiswa perempuan Afghanistan untuk belajar di Indonesia.

Selama ini, pemerintah Indonesia juga turut aktif menerima pejabat senior maupun perwakilan pemerintah Afghanistan untuk mengikuti beberapa program kerjasama antara dua negara melalui pihak ketiga dalam skema Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Salah satu program prioritas Kementerian PPPA adalah *Three ends* atau tiga akhiri, yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan, upaya kerjasama yang telah dilakukan adalah pelatihan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan melalui keluarga berencana, intervensi ekonomi, dan desain busana muslim (Rachman & Dkk, 2021).

Peran Indonesia dalam membantu Afghanistan mencapai perdamaian dengan pemberdayaan wanita menjadi salah satu proses penting untuk menciptakan kesejahteraan di Afghanistan, begitu juga dengan diplomasi Islami yang turut dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menjalin hubungan dengan Pemerintah Afghanistan dan Taliban untuk mendorong proses perdamaian antara Afghanistan dan Taliban dapat terwujud. Kesimpulan dari peran Indonesia dalam proses perdamaian di Afghanistan dan terus menjaga komitmen pemberdayaan wanitanya, Indonesia secara konsisten menggunakan pendekatan diplomasi dengan perspektif soft power, terutama mengacu pada perspektif mata uang *soft power*. Mata uang *soft power* ini memiliki tiga komponen termasuk *beauty, brilliance dan benignity* (Rachman & Dkk, 2021). Dengan ketiga komponen tersebut, Indonesia dapat menunjukkan soft powernya kepada Afghanistan untuk menarik perhatian dan simpati dari Afghanistan.

Komponen *beauty* tersebut diwujudkan oleh Indonesia yang memiliki beberapa kesamaan dengan Afghanistan. Kesamaan ini mencakup gagasan umum, tujuan bersama, penyebab umum penyebab konflik, dan visi bersama. Dengan adanya kesamaan tersebut, Afghanistan tertarik untuk mempelajari dan meniru kebijakan dan metode yang telah digunakan Indonesia dalam pemberdayaan wanita untuk diaplikasikan dalam mendukung perdamaian di Afghanistan. Komponen *brilliance*, diwujudkan oleh Indonesia dengan menunjukkan kemampuan dan keberhasilannya dalam menangani pemberdayaan wanita guna mendukung proses perdamaian di Afghanistan. Melihat kesuksesan Indonesia, Afghanistan memiliki rasa kagum terhadap Indonesia yang berharap dapat mengidentifikasi dirinya dan mengadopsi budaya dan perilaku dalam pemberdayaan wanita dari Indonesia. Semuanya dilakukan dengan harapan Afghanistan bisa sukses meningkatkan peranan wanita seperti di Indonesia. Komponen *Benignity*, diwujudkan Indonesia dengan memberikan kebaikan berupa bantuan kepada Afghanistan dalam upaya perdamaian. Bantuan tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan *capacity building* berupa upaya dalam bidang kesejahteraan, bantuan pemikiran, dan pendampingan penguatan sumber daya manusia dengan memberikan beasiswa dan pengiriman mahasiswi ke Indonesia, pelatihan tenaga kerja wanita pertambangan, UMKM, Diplomat dan Studi Banding untuk Pemilu dan pembentukan Nahdatul Ulama Afghanistan (NUA). Ketiga komponen *Soft Power Currencies* memiliki cara yang berbeda namun tetap memiliki tujuan yang sama yaitu menarik perhatian Afghanistan untuk meniru dan mendukung Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan komitmen pemberdayaan wanita dalam upaya perdamaian dunia.

Akan tetapi hubungan kerjasama bilateral yang sudah tertata, terlaksana tersebut seolah menjadi tanda tanya ketika pada Agustus 2021 pemerintahan demokratik Afghanistan berhasil direbut dan dikuasai kembali oleh Taliban. Tentu hal ini menjadi *concern* pemerintah Indonesia. Proses pengambil alihan pemerintah resmi ke tangan Taliban membuat suasana politik, sosial serta ekonomi di Afghanistan menjadi kacau, dimana banyak negara yang memiliki hubungan bilateral dan diplomasi dengan Afghanistan banyak mengevakuasi warganegara mereka untuk dipulangkan ke negara asal. Tidak terkecuali Indonesia yang menarik semua staf KBRI serta warga negaranya untuk dipulangkan ke Indonesia mengingat situasi *chaos* yang terjadi pasca Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagi banyak kalangan masyarakat, akankah kebijakan hubungan bilateral Indonesia-Afghanistan berubah pasca Taliban berkuasa. Sebelum masuk bahasan terkait berubah atau tidaknya kebijakan pemerintah Indonesia terhadap

Afghanistan ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu bagaimana kebijakan luar negeri dibuat oleh suatu negara. Kebijakan luar negeri (*foreign policy*) (Plano & Oton, 1999), merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik; 2. Menetapkan faktor situasional dan lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijaksanaan luar negeri; 3. Menganalisis kepentingan kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki; 4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan; 6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki. Sehingga dengan memahami bagaimana langkah pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, tidak serta merta kan merubah arah kebijakannya seratu persen. Karena selama kepentingan nasional negara tidak dirugikan, maka kebijakan terutama dalam hubungan bilateral masih bisa di pertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Oleh karena itu dengan berkuasanya Taliban kembali di Afghanistan mungkin ada beberapa kerjasama bilateral yang akan mengalami kendala seperti dalam hal pemberdayaan perempuan dan dibidang ekonomi. Tentu ini menjadi hal yang wajar terjadi, karena hubungan bilatera yang terjalin dilakukan pada peemrintahan sebelumnya relatif demokratis dibandingkan dengan pemerintahan transisi pasca Taliban berkuasa sekarang. Akan tetapi banyak dari para pembuat keputusan di Indonesia menyerukan agar hubungan bilateral Indonesia-Afghanistan dapat berlangsung dan terpelihara dengan baik setelah Taliban berkuasa. Seperti yang dikemukakan oleh Komisi I DPR RI berharap proses integrasi dan transisi pemerintahan Afghanistan usai Taliban menguasai Istana Kepresidenan di Kabul dapat berlangsung cepat, guna menghindari kerugian masyarakat. Sehingga apapun yang terjadi selanjutnya, tidak akan mempengaruhi apalagi merugikan hubungan diplomatik Afghanistan dengan Indonesia (Voi, 2021). Hal ini juga ditekan oleh mantan wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla yang meyakini bahwa pemeritah Indonesia akan terus melanjutkan hubungan diplomatik dengan Afghanistan kendati roda pemerintahan sekarang dikuasai Taliban. Karena saat Taliban berkuasa pada 1996-2001, pemerintah Indonesia tetap

mempertahankan kantor kedutaanya di Kabul (Yahya, 2021). Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Direktur Jenderal Asia Pasific Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jalani, selain dengan pemerintah Afghanistan sebelumnya, Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan Taliban. Indonesia kerap diminta sebagai juru damai di antara keduanya. Taliban juga mengharapkan Indonesia berperan aktif dalam proses pembangunan Afghanistan di masa mendatang (Devina, 2021). Sehingga untuk tetap menjalin hubungan bilateral ini, pemerintah Indonesia dan negara-negara di dunia, harus berperan aktif dalam proses perdamaian di Afghanistan. Yang terpenting dari proses pengambil alihan kekuasaan ini adalah jangan sampai masyarakat di sana yang jadi korban. Karena Janji Taliban untuk mebuat pemerintahan inklusif dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam memerintah masih perlu dibuktikan terutama terkait dengan hak-hak perempuan yang menjadi *concern* terbesar dari janji Taliban.

KESIMPULAN

Kebijakan dalam hubungan bilateral suatu negara tidak serta merta akan berubah setiap kali pemerintahan berubah. Akan tetapi perubahan arah kebijakan hubungan bilateral tersebut harus dikaji dan di evaluasi terlebih dahulu jika bisa merugikan dan membahayakan kepentingan nasional negara. Seperti yang terjadi antara Indonesia dan Afghanistan, dimana hubungan bilateral kedua negara menjadi sorotan ketika pemerintahan Afghanistan yang demokratis berhasil diambil alih oleh Taliban. Pengambil alihan pemerintahan oleh Taliban ini menjadikan negara Afghanistan diliputi kepanikan dan *chaos* dalam hal ekonomi, politik dan sosial. Bahkan banyak dari negara-negara lain termasuk Indonesia mengevakuasi staf dan warganya untuk menghindari dan mengantisipasi terjadinya kekerasan dan perang. Meskipun staf KBRI di evakuasi, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk tetap melanjutkan hubungan diplomatik dan bilateral yang telah berlangsung selama ini. Hal ini juga mengingat komitmen dari pemerintahan Taliban yang baru telah berkomitmen untuk tidak mengulangi cara-cara kekerasan yang dilakukan pada pemerintahannya yang dulu serta komitmen untuk memberikan ruang gerak bagi perempuan memberikan sedikit harapan bagi pemerintahan Indonesia untuk tetap melanjutkan komitmennya dalam menjalin hubungan bilateral yang telah disepakati dua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalton, J. R. (2008). *State Building, Security, and Social Change in Afghanistan*. In The Asia Foundation.
- Devina, D. (2021). *Pasca Taliban Berkuasa Bagaimana Nasib Hubungan Bilateral Indonesia-Afghanistan*. Kompas. [https://www.kompas.tv/article/204049/pasca-taliban-berkuasa-](https://www.kompas.tv/article/204049/pasca-taliban-berkuasa)

bagaimana-nasib-hubungan-bilateral-indonesia-afghanistan

- Kemenlu. (2020). *Hubungan Luar Negeri Indonesia*. Kemenlu.Go.Id. <https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9JRE4tVU5JVEVEJTIwTkVXU19FRElTSSUyMFNFUFRTUJFUyMDIwMTgucGRm>
- Mustinda, L. (2020). *Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional*. <https://news.detik.com/berita/d-5256130/peran-indonesia-dalam-hubungan-internasional.%0A%0A>
- Nanda, K. (2020). *Landasan Hubungan Internasional Indonesia*. <https://gemapembaharuan.com/2020/07/07/landasan-hubungan-internasional-indonesia/>
- Plano, J. C., & Oton, R. (1999). *The International Relations Dictionary*. Clio Press, Ltd.
- Rachman, A., & Dkk. (2021). *Menyemai Cinta Damai di Bumi AFGHANISTAN (Kontribusi Indonesia dalam Perdamaian Dunia)*. Pusat Riset Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia & UKK RUMAH PERDAMAIAN SKSG UI.
- Republika. (2017). *Indonesia-Afghanistan Tingkatkan Kerjasama Bilateral*. <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/11/06/oz05vs440-indonesiaafghanistan-tingkatkan-kerja-sama-bilateral>
- Suastha, R. D. (2021). *Taliban Kuasai Afghanistan: Salah Siapa?* CNN. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210824063654-120-684348/taliban-kuasai-afghanistan-salah-siapa>.
- Thomas, C. (2020). *Afghanistan: Background and U.S. Policy In Brief*.
- US. Department Of State. (2001). *Report on the Taliban's War Against Women Released by the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor*. <https://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/6185.htm>
- Voi. (2021). *Taliban Kembali Berkuasa, DPR Harap Hubungan Bilateral Afghanistan-Indonesia Tetap Terjaga*. <https://voi.id/berita/76939/taliban-kembali-berkuasa-dpr-harap-hubungan-bilateral-afghanistan-indonesia-tetap-terjaga>
- Yahya, A. N. (2021). *Taliban Kembali Berkuasa, JK Optimistis Indonesia Tak Putus Hubungan Diplomatik dengan Afghanistan*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/16/11265901/taliban-kembali-berkuasa-jk-optimistis-indonesia-tak-putus-hubungan?page=all>.

KEBIJAKAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AFGHANISTAN PASCA BERKUASANYA TALIBAN

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | www.scribd.com Internet Source | 8% |
| 2 | www.suaramerdeka.com Internet Source | 4% |
| 3 | republika.co.id Internet Source | 2% |
| 4 | text-id.123dok.com Internet Source | 2% |
| 5 | id.wikipedia.org Internet Source | 2% |
| 6 | dev.kemenpppa.go.id Internet Source | 2% |
| 7 | voi.id Internet Source | 2% |
| 8 | eprints.undip.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | kemenpppa.go.id Internet Source | 1% |

10

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On